



# PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

Azizah Putri Aditya<sup>1)</sup>, Mar'atus Solikah<sup>2)</sup>, Badrus Zaman<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia  
Email: [azizahaditya73@gmail.com](mailto:azizahaditya73@gmail.com)

<sup>2)</sup> Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia  
Email: [solikahkediri@gmail.com](mailto:solikahkediri@gmail.com)

<sup>3)</sup> Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia  
Email: [pak.badrus@gmail.com](mailto:pak.badrus@gmail.com)

## Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Locally Generated Revenue (PAD) on Capital Expenditures in city/regency governments in East Kalimantan Province during the 2020–2023 period. The study is motivated by a mismatch between the increasing trend of PAD and the suboptimal allocation of Capital Expenditures, even though capital expenditure is a crucial component in infrastructure development and improving community welfare under regional autonomy. A quantitative associative approach was employed using multiple linear regression analysis. The data were obtained from the Regional Budget (APBD). The analysis included classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), t-tests, F-tests, and the coefficient of determination ( $R^2$ ). The results show that partially, Regional Taxes and PAD significantly affect Capital Expenditures, while Regional Levies do not have a significant effect. However, simultaneously, all three variables significantly influence Capital Expenditures, with an  $R^2$  value of 47.6%. These findings highlight the importance of optimizing PAD, particularly from the tax sector, to support productive and sustainable capital expenditures. The study concludes that strengthening regional fiscal independence through PAD optimization, along with enhancing transparency and public participation in financial management, is essential for supporting capital expenditure allocation aimed at development and public service improvement.

**Keywords:** Regional Taxes; Regional Levies; Locally Generated Revenue; Capital Expenditures; Fiscal Independence

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2023. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara tren peningkatan PAD dengan alokasi Belanja Modal yang belum optimal, padahal belanja modal merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengujian dilakukan melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 47,6%. Temuan ini mengindikasikan pentingnya optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak, dalam mendukung belanja modal yang produktif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kemandirian Fiskal



## PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah, dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan membiayai pembangunan melalui otonomi fiskal. “Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahannya melalui pelimpahan kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah” (Meilda Ellysa Putri1 2015). Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan wilayah dan menyediakan layanan publik secara optimal melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari et al. 2019)

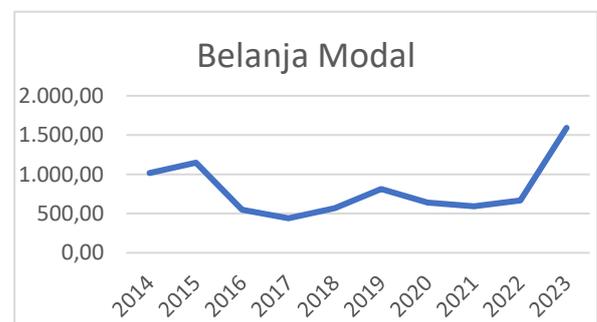
Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan sumber keuangan utama yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. (Zenritami 2021) menyatakan bahwa “PAD adalah sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah pasca-otonomi daerah,” yang berperan penting dalam pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. (Oktavia 2023) menambahkan bahwa “Pajak daerah dan Retribusi Daerah diartikan sebagai pembayaran wajib individu maupun badan hukum... yang dialokasikan untuk pemenuhan persyaratan regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.” Peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagai revisi dari UU No. 18 Tahun 1997.

Meskipun pajak dan retribusi merupakan sumber yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh daerah, kenyataannya masih terdapat ketimpangan antara peningkatan PAD dan belanja modal. Di Provinsi Kalimantan Timur, daerah dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang tinggi, alokasi belanja modal belum menunjukkan perkembangan proporsional terhadap pertumbuhan PAD. “Data realisasi APBD Kalimantan Timur tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp17,75 triliun (94,97%) dari target, realisasi belanja hanya mencapai 48,76%,” yang mencerminkan ketidakseimbangan alokasi fiskal, khususnya untuk belanja modal produktif.

Belanja modal sendiri merupakan komponen strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi pada penciptaan aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan (Adolph 2016; Nurdawaty, Zaman, and Kristinawati 2017). Ketika belanja modal tidak meningkat secara sepadan dengan PAD, maka proses pembangunan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sebagian besar PAD masih dialokasikan untuk belanja operasional, bukan untuk investasi pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi tajam selama 2014–2023. “Rata-rata belanja modal menurun dari Rp1.015,26 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp440,43 miliar di tahun 2017, lalu meningkat kembali hingga Rp1.591,68 miliar pada tahun 2023.” Ketidakstabilan ini mengindikasikan belum adanya konsistensi dalam strategi pengelolaan PAD yang diarahkan pada pembangunan aset jangka panjang. Hal ini bisa dilihat dari hasil tabel berikut,



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

**Gambar 1.** Rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Meski beberapa studi sebelumnya telah mengulas pentingnya PAD dalam mendukung pembangunan, sebagian besar masih berfokus pada konteks nasional atau provinsi secara umum dan belum mengkaji lebih dalam dinamika fiskal antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain itu, minimnya studi kuantitatif yang menguji secara simultan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD terhadap belanja modal di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan adanya celah literatur yang perlu diisi. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks pasca-pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2020–2021, prioritas anggaran bergeser ke sektor kesehatan dan bantuan sosial, sedangkan pada tahun 2022–2023, fokus fiskal beralih ke pemulihan ekonomi dan infrastruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara empiris bagaimana PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah memengaruhi belanja modal di Provinsi Kalimantan Timur selama 2019–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan metode regresi linier berganda, kajian ini bertujuan memberikan gambaran faktual sekaligus merekomendasikan strategi fiskal yang relevan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri secara fiskal.



## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan studi yang dilakukan saat ini ialah penelitian kuantitatif. Studi kuantitatif dicirikan oleh pendekatannya yang terukur, rasional, dan sistematis, menggunakan data statistik yang diwakili secara numerik untuk analisis statistik selanjutnya.

Penelitian akan dilakukan dengan cara menganalisis data yang dipublikasikan di situs web yang menyajikan informasi mengenai APBD Tahunan Provinsi. Studi ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran, yang bersumber dari Kementerian <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, yang mencakup periode 2019-2023.

Dengan menggunakan data yang telah ada, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tanpa harus mengandalkan pengumpulan data primer melalui kuisisioner atau survei. Hal ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang telah terverifikasi dan dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga hasil analisis dapat lebih akurat dan representatif terhadap kondisi keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan wawasan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur serta layanan publik.

### 2. Teknik Penelitian

Pendekatan metodologis membahas tujuan studi untuk menjelaskan variabel yang secara signifikan mempengaruhi Belanja Modal. Dalam studi ini, peneliti akan memanfaatkan data sekunder yang dipublikasikan, seperti APBD Tahunan Provinsi, untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap belanja modal. Dengan demikian, teknik yang cocok ialah Penelitian Kausal.

Dengan menerapkan teknik ini, peneliti dapat menentukan apakah perubahan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Studi kausal memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah tersedia, sehingga memberikan wawasan yang lebih jelas tentang dinamika keuangan daerah.

Dengan demikian, teknik ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan relevan mengenai bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD berkontribusi terhadap keputusan belanja modal di tingkat pemerintah daerah yaitu di Provinsi Kalimantan Timur

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Laporan Realisasi APBD dari 10 pemerintah daerah (7 kabupaten dan 3 kota) di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2019–2023 (Asrulla et al. 2023)

Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni metode non-probabilitas yang didasarkan pada kriteria tertentu. Pemilihan dilakukan hanya terhadap Kabupaten/Kota yang secara konsisten memublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara online dan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama periode studi. Kriteria ini memastikan bahwa data yang dianalisis memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, sehingga hasil penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD terhadap Belanja Modal menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

kriteria penyaringan data dalam penelitian yang dilakukan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019–2023. Dari total 10 kabupaten/kota yang tersedia, seluruhnya telah memublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara online. Namun, sebanyak 2 daerah tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu tersebut, sehingga dikeluarkan dari sampel untuk menjaga konsistensi dan validitas data. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8 kabupaten/kota dengan waktu pengamatan adalah 5 tahun (2019–2023), maka total data observasi yang dianalisis berjumlah 40 (8 kabupaten/kota × 5 tahun), yang dianggap cukup representatif untuk mendukung analisis kuantitatif mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

### 4. Tempat Penelitian

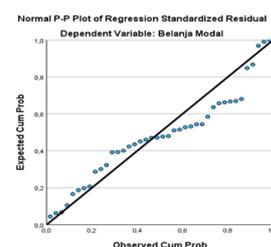
Studi ini akan dilaksanakan pada Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019 – 2023 pada situs resminya <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dengan mengambil data laporan keuangan pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Analisis dan Intrepretasi Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil uji normalitas, menghasilkan diagram sebagai berikut :



Sumber : Output SPSS

**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas

Informasi yang digambarkan pada Gambar 2. menunjukkan distribusi normal, seperti yang ditunjukkan



oleh keselarasan di sepanjang garis diagonal, sehingga menegaskan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**2. Uji Multikolinearitas**

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas, sebagai berikut :

**Tabel 1.** Output Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	236,335	133,335	1,772	,085		
	Pajak Daerah	-4,418	1,085	-4,071	<,001	,105	9,529
	Retribusi Daerah	21,436	10,831	,638	1,979	,135	7,405
	PAD	2,795	,511	1,187	<,001	,298	3,357

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS

Tabel menyatakan bahwa Pajak Daerah, Pajak Daerah, dan PAD memiliki nilai toleransi 0,105, 0,135, dan 0,298 (semua di atas 0,10) dan nilai VIF 9,529, 7,450, dan 3,375 (semua di bawah 10), mengkonfirmasi tidak adanya multikolinearitas dalam model ini.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas, sebagai berikut :

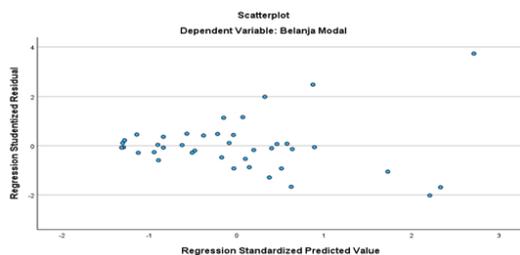
**Tabel 2.** Output Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,373	1,169	-1,174	,247
	X1PajakDaerah	,017	,054	,086	,756
	X2RetribusiDaerah	-,071	,066	-,274	1,078
	X3PAD	,112	,076	,386	1,471

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : Output SPSS

Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa nilai signifikansi untuk Pajak Daerah (0,756), Pajak Daerah (0,287), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (0,149) melebihi 0,05, sehingga menyatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians residual bersifat homogen atau konstan, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.



Sumber: Output SPSS

**Gambar 3.** Output Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Gambar menampilkan scatterplot dengan distribusi titik acak di sekitar garis horizontal nol pada sumbu Y,

menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

**B. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Berikut merupakan hasil Analisis dan Regresi Linier Berganda, sebagai berikut :

**Tabel 3.** Coefficients

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	236,335	133,335	1,772	,085	
	Pajak Daerah	-4,418	1,085	-4,071	<,001	
	Retribusi Daerah	21,436	10,831	,638	1,979	
	PAD	2,795	,511	1,187	<,001	

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS

$$Y = 236,335 - 4,418 X_1 + 21,436 X_2 + 2,795 X_3$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

X<sub>3</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persamaan regresi menandakan hal berikut:

- Konstanta (236,335)  
Nilai konstanta sebesar 236,335 menunjukkan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD bernilai nol, maka Belanja Modal diperkirakan sebesar 236,335 miliar. Ini merupakan baseline sebelum mempertimbangkan pengaruh ketiga variabel independen.
- Pajak Daerah (X<sub>1</sub> = -4,418)  
Koefisien Pajak Daerah bernilai negatif sebesar -4,418, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan Pajak Daerah justru menurunkan Belanja Modal sebesar 4,418 miliar, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi < 0,001 menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik, dan koefisien beta -1,490 mencerminkan pengaruh negatif yang cukup kuat secara relatif.
- Retribusi Daerah (X<sub>2</sub> = 21,436)  
Koefisien sebesar 21,436 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Retribusi Daerah meningkatkan Belanja Modal sebesar 21,436 miliar. Namun, nilai signifikansi 0,055 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Koefisien beta sebesar 0,638 menunjukkan pengaruh positif yang sedang secara relatif.
- Pendapatan Asli Daerah / PAD (X<sub>3</sub> = 2,795)  
Koefisien PAD sebesar 2,795 menunjukkan bahwa peningkatan 1 satuan PAD meningkatkan Belanja Modal sebesar 2,795 miliar. Dengan nilai signifikansi < 0,001, pengaruh ini dinyatakan signifikan secara statistik, dan koefisien beta 1,187 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan positif secara relatif terhadap Belanja Modal.



### C. Hasil Analisis dan Intrepetasi Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)

Berikut merupakan Analisis Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>), sebagai berikut :

**Tabel 4.** Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 <sup>a</sup>	,494	,452	448,26115

a. Predictors: (Constant), PAD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,494, artinya 49,4% variasi Belanja Modal dijelaskan oleh Pajak Daerah dan PAD, sementara 50,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adjusted R Square sebesar 0,452 mengindikasikan model tetap cukup baik setelah penyesuaian jumlah variabel. Nilai R sebesar 0,703 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antar variabel, dan Standard Error of the Estimate sebesar 448,26115 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi masih dalam batas wajar.

### D. Hasil Analisis Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji t

Berikut merupakan Pengujian Hipotesis Uji t, sebagai berikut :

**Tabel 5.** Uji t (Uji Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	236,335	133,335		1,772	,085
	Pajak Daerah	-4,418	1,085	-.1490	-4,071	<,001
	Retribusi Daerah	21,436	10,831	,638	1,979	,055
	PAD	2,795	,511	1,187	5,465	<,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ( $p = 0,001 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sebaliknya, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial ( $p = 0,055 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Sementara itu, PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ( $p = 0,001 < 0,05$ ), yang mengakibatkan penolakan  $H_0$  dan penerimaan  $H_a$ .

#### 2. Uji F

Berikut merupakan Pengujian Hipotesis Uji F, sebagai berikut :

**Tabel 6.** Uji F (Uji Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7063380,961	3	2354460,320	11,717	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	7233770,017	36	200938,056		
	Total	14297150,978	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), PAD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS

Pengujian hipotesis simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 11,717 dengan signifikansi  $< 0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, secara

simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Timur.

### KESIMPULAN

Studi ini dilaksanakan melalui pemanfaatan 46 data panel yang mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun, dari tahun 2019 hingga 2023, yang mengarah pada kesimpulan yang diambil dari analisis regresi linier ganda dan disimpulkan.:

3. Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, peningkatan penerimaan pajak daerah berkorelasi positif dengan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal.
4. Retribusi Daerah (X2) secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan bahwa retribusi, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan pajak daerah, tetap menjadi sumber pendapatan penting dalam mendukung kegiatan belanja modal.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD/X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD secara umum akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya belanja modal.
6. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD secara simultan memengaruhi Belanja Modal secara signifikan, yang dibuktikan melalui uji F dan nilai R-square. Ini menandakan bahwa kombinasi ketiganya memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan variasi belanja modal di daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. (2016). "Pengaruh Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) Oleh." : 1–23.
- Asrulla, Risnita, M. S Jailani, and Firdaus Jeka. (2023). "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3): 26320–32.
- Meilda Ellysa Putri1, Sri Rahayu2. (2015). "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution On." *Jurnal e-Proceeding of Management* 2(1): 281–88.



- Nurdiwaty, Diah, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati. (2017). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17(1): 43–59.
- Oktavia, Bela Rafti. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.*
- Puspitasari, Endah, Sari Purnama, Elis Badriah, and Kartika Risna. (2019). "Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?" *JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 7(1): 37–48.
- Zenritami, Salma Labita. (2021). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2020."